

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan sosial merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu baik yang bersifat kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial. Hal ini juga di dukung oleh Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1974 (dalam Suharto, 2009, hlm. 1) menegaskan bahwa

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan penjungjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakikanya merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah, mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 2009, hlm. 4). Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan pembangunan manusia yang dilakukan secara sengaja dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup yang dimiliki manusia. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam konteks pembangunan kesejahteraan mencakup pertumbuhan ekonomi contohnya sektor keuangan, sektor industri, pengembangan manusia salah satunya dengan pendidikan, perawatan manusia contohnya sektor kesehatan, kesejahteraan sosial (Suharto, 2019 hlm. 6)

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial tidak di berikan hanya pada satu golongan saja melainkan dari seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial tanpa melihat status sosial. Namun, prioritas utama pembangunan kesejahteraan sosial merupakan kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan merupakan salah satu masalah sosial yang senantiasa hadir di sekitar masyarakat, khususnya di sekitar negara-negara berkembang. Kemiskinan menjadi salah satu

masalah besar yang menjadi perbincangan di masyarakat luas. Kemiskinan menjadi salah satu aspek yang terdapat pada MDGs (*Millineum Development Gold*) yang menjadi salah satu tolak ukur pembangunan negara.

Menurut BPS dan Depsos dalam Suharto (2009, hlm.134) bahwa

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batasan kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskina adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100/kg perhari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi,serta aneka barang dan jasa lainnya.

Terdapat 8 tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs) yaitu menghapuskan kemiskinan yang ekstrim dan kelaparan, memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kualitas kesehatan ibu, memberantas HIV/AIDS, malaria, dan beragam penyakit lainnya, menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pencapaian sasaran MDGs menjadi salah satu prioritas utama bangsa Indonesia. Pencapaian tujuan dan target tersebut bukanlah semata-mata tugas pemerintah tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Sehingga pencapaian tujuan dan target MDGs harus menjadi pembahasan seluruh masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah 237.641.326 Jiwa. Jawa barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa.Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Data BPS menerangkan terdapat warga miskin dengan jumlah 27727,78 jiwa/September 2014 dengan besaran 10,96% tersebar dari berbagai provinsi di indonesia (www.bps.go.id).

Salah satu solusi dalam memecahkan masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah melalui kementerian sosial RI memiliki program kelompok usaha bersama (KUBE) bagi fakir miskin yang bertujuan untuk meningkatkan usaha

ekonomi produktif khususnya dalam peningkatan ekonomi. Program kelompok usaha bersama berdasarkan pedoman pertumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) Departemen Sosial RI Tahun 2010 Yaitu KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses program kegiatan kesejahteraan sosial untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan.

Keberhasilan dari kelompok usaha bersama di pengaruhi oleh kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yaitu pendamping sosial yang menguasai pemahaman kesejahteraan sosial di masyarakat. Program penanganan kemiskinan, contohnya masyarakat miskin yang di bantu merupakan kelompok masyarakat yang tidak berdaya karena hambatan faktor *internal* maupun *external*. Pendamping sosial KUBE kemudian hadir untuk memecahkan masalah masyarakat.

Menurut Suharto (2009, hal.94) memaparkan “Pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti, merancang program perbaikan kehidupan ekonomi, mobilisasi sumberdaya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerja sama dengan pihak lain yang sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan sosial KUBE merupakan salah satu strategi dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dalam program penanganan masalah kemiskinan, masyarakat yang mendapatkan bantuan seringkali merupakan kelompok yang tidak mampu. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang terlibat membantu Dalam rangka mengoptimalkan kelompok usaha bersama (KUBE) bagi masyarakat, pemerintah memberikan kebijakan terhadap balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kemampuan pendamping kelompok usaha bersama melalui dunia pendidikan sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih lanjut Menurut undang-undang no 20. Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memaparkan,

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan didukung oleh pandangan Philips H. coombs (dalam Marzuki, 2010, hlm.137) mengkatagorikan pendidikan menjadi tiga macam jalur pendidikan yaitu pendidikan *formal*, *informal* dan *non formal*. Pendidikan *non formal* merupakan bagian dari pendidikan yang memiliki fungsi sebagai penambah, pengganti hingga pelengkap pendidikan formal. Menurut Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 26 tentang sistem pendidikan nasional, Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial (BBPPKS) Regional II Bandung menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi pendamping sosial KUBE untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja sosial masyarakat agar (TKSM) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 5 memaparkan bahwa

Lembaga kursus atau pelatihan adalah satuan pendidikan non formal yang berfungsi menyelenggarakan kursus atau pelatihan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Menurut kamus umum bahasa indonesia pelatihan merupakan pelajaran untuk memperoleh suatu keterampilan, sedangkan menurut Flippo (dalam Kartika, 2011, hlm.8) memaparkan “Pelatihan merupakan suatu usaha pengetahuan dan keterampilan agar karyawan dapat mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Dari Pemaparan di atas mendefinisikan pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh atau meningkatkan kompetensi yang dimiliki”. Sasaran dari pelatihan pendamping sosial KUBE adalah pendamping sosial yang dikatagorikan sebagai Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM). TKSM merupakan tenaga kesejahteraan sosial yang bersumber dari orang-orang yang biasanya bermitra lokal. TKSM pada dasarnya merupakan orang dewasa yang

memiliki latar belakang, karakteristik hingga pengalaman hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Tenaga kesejahteraan sosial adalah relawan yang bekerja ketika terjadi bencana atau musibah. Terdapat perbedaan antara pekerja sosial dengan relawan. Relawan senantiasa bekerja dan memberi pertolongan atas dasar belas kasihan (*philantropy*) atau karena dorongan amal (*charity*), sedangkan pekerja sosial menurut Edi Suharto (2009, hlm.24) dalam menjalankan aktivitas profesionalnya didasari oleh tiga komponen dasar yang secara intergratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial: kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*) dan kerangka nilai (*body of values*).

Pendamping sosial memiliki fungsi salah satunya sebagai fasilitator, khususnya dalam memfasilitasi kelompok usaha bersama (KUBE) di masyarakat. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber (Suharto: 2009, hlm. 95).

Kondisi yang ditemukan pada tempat penelitian yaitu Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung disana terdapat beberapa kegiatan pelatihan. pelatihan yang di laksanakan bagi tenaga kerja sosial pemerintah dan tenaga kerja sosial masyarakat. Peneliti memilih pelatihan pendamping KUBE bagi tenaga kesejahteraan masyarakat sebagai penelitian karena program kelompok usaha bersama menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menentaskan masalah kemiskinan khususnya di Indonesia.

Pelatihan pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja sosial masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal di masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai pelatihan reguler yaitu pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan

kebutuhan dengan jumlah peserta 39 orang berasal dari provinsi wilayah kerja BBPPKS Regional Bandung yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Berdasarkan pada uraian yang ada maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui “Pelatihan Pendamping sosial dalam meningkatkan kemampuan fasilitasi program kelompok usaha bersama (KUBE)”. Berdasarkan hasil observasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Identifikasi Masalah Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Pendamping sosial KUBE bersifat regular yaitu pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam mengatasi permasalahan sosial yang sedang terjadi.
2. Penyelenggaraan pelatihan pendamping sosial kelompok usaha bersama (KUBE) dilaksanakan selama tujuh hari. Pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada **60 %** teori dan **40%** praktek.
3. Peserta pelatihan Pendamping sosial KUBE berjumlah 39 orang yang memiliki latar belakang, usia, karakteristik, hingga pengalaman yang berbeda-beda.
4. Keberhasilan Program Kelompok usaha bersama salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan pendamping sosial yang menguasai pemahaman kesejahteraan dimasyarakat.
5. Pendamping sosial kelompok usaha bersama memiliki peran sebagai fasilitator, yang berkaitan dengan fungsi sebagai model, mediasi dan negosiasi,serta melakukan manajemen sumber.
6. Terdapat peningkatan kemampuan peserta pelatihan pendamping KUBE sebesar 22,99%. Sebelum pelatihan tingkat kemampuan peserta adalah 72,01% dan sesudah Pelatihan kemampuan peserta meningkat menjadi 98,65 %. Hal ini didapatkan setelah kegiatan pembelajaran dan evaluasi pelatihan KUBE di BBPPKS Regional II Bandung.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelatihan pendamping sosial dalam meningkatkan kemampuan fasilitasi kelompok usaha bersama?”. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembelajaran pelatihan pendamping sosial kelompok usaha bersama di BBPPKS?
2. Bagaimana peningkatan kemampuan fasilitasi pendamping sosial kelompok usaha bersama?
3. Apa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelatihan pendampingan sosial kelompok usaha bersama di BBPPKS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dari:

1. Mengetahui proses pembelajaran pelatihan pendamping sosial kelompok usaha bersama di BBPPKS.
2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan fasilitasi pendamping sosial kelompok usaha bersama.
3. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelatihan pendampingan sosial kelompok usaha bersama di BBPPKS.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat umum
 - a. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian tentang pelatihan pendamping sosial kelompok usaha bersama (KUBE) dalam meningkatkan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial.

- b. Manfaat Teoretis

Manfaat Teoretis dari penelitian ini adalah dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi para mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah dalam

mempelajari mengenai konsep pendidikan *non formal* yang terjadi dalam pelatihan.

2. Manfaat khusus

- a. Proses pembelajaran pelatihan pendamping sosial kelompok usaha bersama di BBPPKS.
- b. Peningkatan kemampuan fasilitasi pendamping sosial kelompok usaha bersama.
- c. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelatihan pendampingan sosial kelompok usaha bersama di BBPPKS.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Mengacu pada Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2014, hlm. 23-39) mengemukakan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- BAB I** Berisi tentang pendahuluan yang didalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Berisi Kajian Pustaka, yang secara garis besarnya mengikuti beberapa teori dan konsep mengenai konsep pelatihan, konsep hasil belajar, konsep pendampingan sosial, dan konsep kelompok usaha bersama.
- BAB III** Membahas tentang Prosedur Penelitian berisi tentang Desain Penelitian, Populasi Dan Sample Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data, Isu etik
- BAB IV** Mencangkup tentang hasil penelitian tentang pelatihan pendamping sosial dalam meningkatkan kemampuan fasilitasi program kelompok usaha bersama yang diselenggarakan di BBPPKS regional II Bandung.
- BAB V** Merupakan hasil akhir dari penelitian didalamnya terdiri dari simpulan dan saran dari penelitian.